

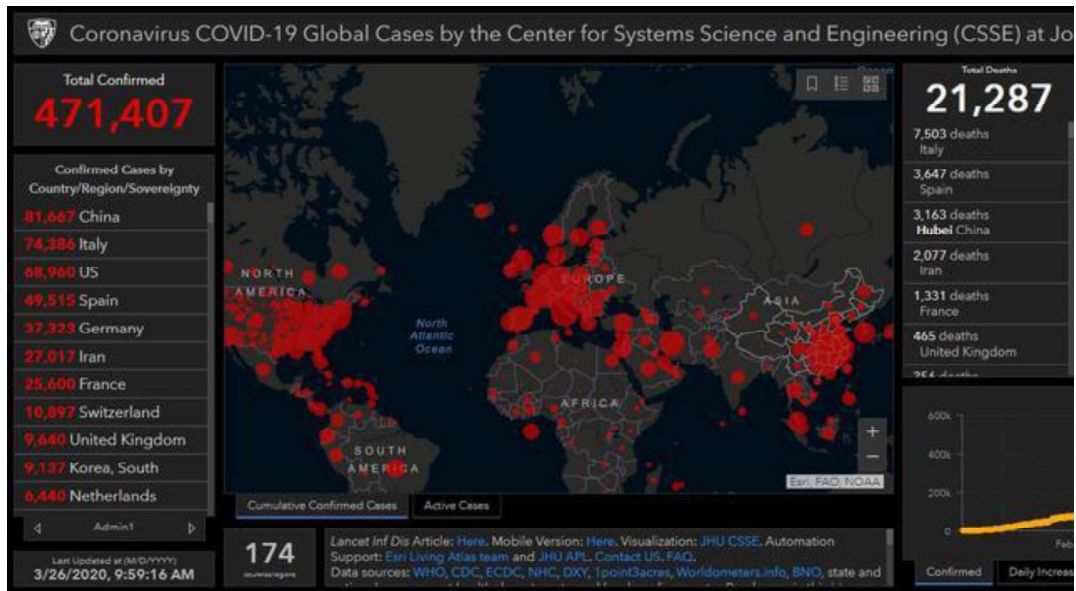
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi antar elite politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan politik di suatu daerah. Relasi yang terjalin antar elite politik nantinya menjadi pondasi dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi di suatu daerah. Didalam kondisi perubahan sosial yang cepat, pengaruh elite akan sangat mempengaruhi perkembangan yang terjadi dari perubahan sosial tersebut. Maka dari itu, elite politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam perumusan kebijakan. Terlebih, Ketika terjadi sebuah perubahan sosial yang kemudian daerah tersebut memasuki masa-masa transisi atau kritis, aspek-aspek fungsional antar elite politik sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan daerah tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin melakukan penelitian terkait relasi elite politik Sidoarjo dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Di Sidoarjo sendiri, terdapat berbagai macam permasalahan internal yang terjadi di dalam Pemerintah Sidoarjo.

Pada 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa telah ditemukan jenis virus baru di Wuhan, China. Otoritas China kemudian mengidentifikasi virus tersebut dengan sebutan Corona Virus (Covid-19). Dalam penelitian Kasus Covid-19 oleh WHO ini, kemudian diumumkanlah bahwasanya Covid-19 memiliki sifat yang mudah menyebar. Dengan sifat yang mudah menyebar tersebut, kemudian Covid-19 menyebar ke hampir seluruh dunia dengan rentan waktu yang singkat. Pada bulan maret, Survey dari *Environmental Systems Research Institute* (ESRI) mencatat terdapat 171 Negara yang sudah terinfeksi virus corona, dengan rincian 21.287 Kasus kematian dan 471.407 kasus positif.



Gambar 1.1 Grafik Negara yang Terindikasi Covid-19

Sumber : gisanddata.maps.arcgis.com

Salah satu dari 171 negara yang disebutkan dalam penelitian tersebut, adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai provinsi. Salah satu provinsi yang paling banyak memiliki kasus Covid-19 adalah provinsi Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Dalam konteks penyebaran Covid-19, Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten pertama yang menerima berbagai dampak yang diterima terlebih dahulu oleh Kota Surabaya.

Sebelum Covid-19 masuk ke Sidoarjo, Sidoarjo memiliki fenomena Bupati yang terindikasi korupsi dan adanya kekosongan kepala dinas. Fenomena yang terjadi di Sidoarjo ini dapat dikaitkan sebagai konflik dalam proses politik yang memang merupakan gejala yang turut hadir dalam kehidupan bermasyarakat (Ramlan surbakti, 1992). Fenomena bupati korupsi dan kekosongan 4 kepala dinas ini kemudian berdampak kepada kinerja di pemerintahan yang berkurang dan hilangnya kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan adanya demo dan munculnya kritik-kritik yang dilakukan masyarakat. Proses penanganan Covid-19 ini kemudian dijadikan momen agar Pemerintah Sidoarjo dapat bangkit dari berbagai permasalahan internal pemerintahan dan dijadikan sebagai upaya Pemerintah Sidoarjo dalam mendapatkan legitimasi politiknya. Dalam hal ini, langkah untuk mendapatkan legitimasi politik yang dilakukan adalah dengan menggunakan legitimasi simbolis

yang mengandalkan kecenderungan moral, dan nilai-nilai yang dipercayai masyarakat. (Ramlan Surbakti, 1992) namun, didalam proses penanganan Covid-19, Sidoarjo lagi-lagi mendapat fenomena baru yaitu meninggalnya Plt Bupati Sidoarjo yang disebabkan oleh Covid-19. Jabatan bupati Sidoarjo sendiri kemudian dialihkan sementara kepada Sekretaris Daerah Sidoarjo yang nantinya kemudian posisi jabatan bupati Sidoarjo dilanjutkan oleh Hudiyono yang dipilih berdasarkan hasil rapat DPRD Sidoarjo yang disetujui oleh pihak kementerian dalam negeri. Fenomena tersebut merupakan peralihan kewenangan yang terjadi karena faktor umur manusia yang terbatas. Jabatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengacu kepada prosedur yang telah disepakati didalam sistem politik yang sudah ada (Paul conn, 1971). Dengan berbagai fenomena tersebut, peneliti kemudian memfokuskan penelitian ini pada pembahasan terkait Relasi Elite Sidoarjo dalam menangani Pandemi Covid-19. Peneliti kemudian mengerucutkan dari fenomena yang sedang terjadi untuk dikaitkan dengan beberapa teori ilmu politik yang memiliki relevansi dalam pembahasan dan penyelesaian masalah yang nantinya akan menjadi pemaparan sebagai dasar penelitian.

Terlepas dari berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di Sidoarjo dalam proses penanggulangan Covid-19. Pertama-tama penulis ingin menjelaskan terkait kondisi dan status dari pandemi Covid-19. Sidoarjo, merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki fungsi penopang ibu kota Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten pertama yang akan menerima berbagai dampak yang diterima terlebih dahulu oleh Kota Surabaya. Salah satu contoh terkait Sidoarjo yang terkena dampak dari keberadaan Kota Surabaya, dapat dilihat dari jumlah ketenagakerjaan yang berada di Surabaya, kemudian membawa dampak kepada laju pertumbuhan penduduk di Sidoarjo. Contohnya, di tahun 2018-2019 laju pertumbuhan ketenagakerjaan di Surabaya naik sebesar 1,49% (Data dari BPS Surabaya) hal inipun kemudian diikuti oleh naiknya laju pertumbuhan di Sidoarjo yang mengalami kenaikan sebesar 1,62% (Data dari BPS Sidoarjo). Hal ini merupakan rahasia umum yang disebabkan oleh faktor geografis Sidoarjo. Dalam konteks penelitian ini, Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten pertama yang menerima dampak Covid-19 dari Surabaya, hal tersebut tidak lepas dari kegiatan masyarakat Sidoarjo dan Surabaya yang sudah membaur diberbagai aspek mulai dari

sosial, ekonomi dll. Pada konteks penanganan Covid-19, pihak elite di Provinsi Jawa Timur menyesuaikan dengan kebijakan pusat berusaha untuk menjadikan Covid-19 sebagai salah satu fokus utama dengan tujuan menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. Surabaya sebagai pusat penyebaran diawal dan sempat menjadi salah satu wilayah yang sangat cepat menyebarkan Covid-19 di ruang lingkup Provinsi Jawa Timur.

PETA SEBARAN COVID-19 JATIM



Gambar 1.2 Peta Sebaran Covid-19

Sumber : <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>

Sesuai data yang disampaikan Satgas Covid di awal pandemi, Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak dari Surabaya selain Gresik dan beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Surabaya.

Diwaktu yang bersamaan, diawal tahun 2020 KPK secara tiba-tiba menyatakan telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo yang didalamnya terdapat 4 orang penerima suap. Salah satu dari ke 4 orang tersebut adalah Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo. Dalam surat dakwaan yang dikeluarkan oleh KPK, Saiful Ilah terindikasi terlibat dalam kasus korupsi bernilai 1,8 Miliar rupiah yang melibatkan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Setelah statusnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada tanggal 15 Januari 2020, Saiful Ilah secara resmi dinonaktifkan dari jabatan Bupati Sidoarjo. Jabatan Bupati Sidoarjo pun diemban

kepada Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin. Pergantian peran kepala pemerintahan ini pun dilandaskan pada Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 yang mengatur terkait Pemerintahan daerah. Pergantian kekuasaan yang diakibatkan kasus korupsi ini membawa dampak yang lebih besar kepada kinerja pemerintahan dan juga masyarakat. Di tataran pemerintahan, terdapat efek kejut di pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan pada masa jabatan sebagai bupati, Saiful Ilah Telah berhasil mencapai berbagai macam pernghargaan-penghargaan bergengsi. Mulai dari meraih adipura, hingga prestasi yang terbaru, yaitu memenangkan lencana karyaabhakti praja nugraha dari kementerian dalam negeri pada tahun 2019. selain itu, salah satu efek yang lainnya adalah kecemasan para pejabat ketika akan menggunakan anggaran untuk melaksanakan program. Salah satu contohnya terdapat di bulan Januari, ketika Kementerian Peridustrian Indonesia melalui LPSE (Layanan Pengadaan barang atau jasa Secara Elektronik) menyatakan bahwa Pemerintah Sidoarjo mengalami penurunan terkait jumlah program yang telah dilaksanakan. Di dalam tataran masyarakat sendiri, Pemerintah Sidoarjo menjadi bahan ejekan dari masyarakat baik itu di medial sosial, ataupun melalui aksi turun ke jalan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maupun kelompok-kelompok masyarkat di depan kantor Bupati Sidoarjo.

Dalam menanggapi permasalahan terkait Covid-19 dan dampak-dampak yang terjadi atas penangkapan bupati yang terindikasi korupsi, Plt Bupati Sidoarjo yang baru, Nur Ahmad Syaifuddin menggunakan tim gugus tugas Covid-19 sebagai solusi dari 3 permasalahan utama yang terjadi di Sidoarjo. Tim gugus tugas covid ini sendiri merupakan tim yang dibuat secara khusus untuk menanggulangi pandemi Covid-19. didalam struktur tim gugus tugas Covid-19 Sidoarjo, terdiri dari dinas-dinas di Pemerintah Sidoarjo, lembaga formal daerah, serta masyarakat Sidoarjo itu sendiri. Dalam perjalanan mencegah penularan Covid-19 di Sidoarjo, Pemerintah Sidoarjo telah menyiapkan anggaran awal sebesar tiga puluh Miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan APD (Alat Pelindung Diri) yang nantinya dipergunakan untuk keperluan petugas medis, bantuan sosial untuk warga yang terdampak, dan juga fasilitas kesehatan lainnya seperti masker, hand sanitizer, dan tempat - tempat fasilitas umum yang akan dipasang area cuci tangan. Setelah 1 bulan Covid-19 masuk ke Sidoarjo, penyebaran Covid-19 yang tinggi menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang paling banyak mendapati kasus positif Covid-19.

Dengan rincian, 94 kasus positif Covid-19 (sembuh 7 orang, meninggal 12 orang). Data inipun menjadi acuan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 di Sidoarjo masih jauh dari kata optimal. Salah satu penyebab tidak optimalnya tim gugus tugas Covid-19 Sidoarjo, dikarenakan terdapat kekosongan 4 kursi kepala dinas. Dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo,
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),
4. Kepala Dinas Sosial.

Kekosongan 4 kepala dinas ini menjadi faktor penghambat dalam penanganan pandemi Covid-19. terlebih lagi, Dengan kekosongan kepala dinas ini, komunikasi yang terjadi antar lembaga menjadi tidak optimal.

Selain terdapat kekosongan 4 kepala dinas, masyarakat Sidoarjo yang didominasi dengan masyarakat muslim kemudian terdampak oleh beberapa kebijakan yang menyangkut keagamaan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan seperti pelarangan penggunaan masjid untuk mengadakan sholat jum'at dan himbauan kepada masyarakat agar sholat lima waktu di rumah masing-masing. Selain itu, di bulan ramadhan, pemerintah juga menyatakan bahwa kegiatan seperti buka bersama, sholat taraweh, aktifitas mudik agar tidak dilakukan. Karena jika dilakukan, akan banyak menimbulkan interaksi antar manusia dan rentan terjadi penyebaran Covid-19 dalam skala yang besar. Selain bidang keagamaan, Covid-19 juga menimbulkan berbagai permasalahan terkait ekonomi di Sidoarjo. Permasalahan ekonomi ini hadir dalam bentuk banyaknya Pemutusan Hak Kerja (PHK) dan penurunan aktifitas ekonomi di masyarakat seperti kegiatan jual-beli. Didalam konteks PHK di Sidoarjo, H. Nur ahmad Syaifudin menyatakan bahwa dirinya telah mendapatkan sebelas ribu pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari banyak perusahaan di Sidoarjo yang terdampak pandemi.

Pada tanggal 28 Agustus 2020. Kabar buruk kembali mendatangi Sidoarjo. Plt Bupati Sidoarjo, yaitu H. Nur Ahmad Syaifuddin, dinyatakan meninggal dunia

disebabkan Covid-19. dengan begitu, posisi bupati Sidoarjo lagi-lagi harus berganti. Pergantian kekuasaan. Di tanggal yang sama itupun, Drs. Achmad Zaini , M.M. diangkat sebagai Pelaksana harian bupati Sidoarjo. Achmad Zaini sebelum menjadi Pelaksana harian, merupakan Sekretaris Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pergantian kepala pemerintahan ini pun bersifat sementara, karena pada tanggal 29 September 2020 telah terbit Surat Keputusan gubernur Nomor 131.35-3067 Tahun 2020. Didalam surat tersebut, dinyatakan bahwa Dr. Hudiyono , M.Si akan menjadi Pj Bupati Sidoarjo. Setelah menjabat menjadi Plt Bupati Sidoarjo, Dr. Hudiyono, M.Si menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menangani Covid-19 di Sidoarjo. Dengan kondisi kritis yang harus ditangani dengan cepat ditambah dengan adanya berbagai macam permasalahan internal di pemerintah, menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana relasi diantara elite Pemerintah Sidoarjo dalam menanggulangi pandemi Covid-19?
2. Bagaimana relasi elite Pemerintah Sidoarjo dengan elite strategis non pemerintahan dalam menaggulangi pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi yang terjadi didalam elite Sidoarjo dalam menangani Covid-19. Sehingga penelitian ini ini juga diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam proses perbaikan kinerja Pemerintah Sidoarjo dalam kondisi pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk menyediakan data rekomendasi dan referensi bagi pihak terkait dengan permasalahan penelitian yang tengah dikaji. Yaitu mengenai Relasi

Elite Sidoarjo dalam menangani Pandemi Covid-19. Serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dan masukan bagi para pembuat kebijakan baik itu dalam pembuatan kebijakan yang baru maupun dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah ada.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada kajian ilmu politik dalam bidang elite politik, kebijakan publik dan kajian birokrasi politik.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pandemi Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan pandemi Covid-19 merupakan epidemi yang terjadi di seluruh dunia dan mempengaruhi sejumlah besar orang. Covid-19 sudah memasuki lebih dari 160 negara dan jumlah kasus yang dikonfirmasi semakin lama semakin banyak yang terpapar Covid-19. dengan jumlah kematian yang semakin besar, maka dengan cepat WHO menyatakan Covid-19 sebagai krisis kesehatan global. Tak selesai pada bidang kesehatan, Covid-19 juga menutup sebagian besar ruang di berbagai macam bidang, khususnya bidang ekonomi. Meskipun ini merupakan krisis kesehatan masyarakat, namun dampak yang diberikan Covid-19 juga merambat pada krisis ekonomi, sosial dan politik. Krisis sendiri merupakan periode kritis setelah terjadi peristiwa yang berdampak negatif pada organisasi di mana keputusan harus dibuat yang akan mempengaruhi garis bawah organisasi. Krisis juga menjadi masa eksplorasi yang membutuhkan pemrosesan informasi yang cepat dan tindakan tegas untuk mencoba meminimalkan kerugian bagi organisasi dan memanfaatkan situasi yang berpotensi merusak. Krisis menurut Morissan (2008) dapat dikategorikan menjadi 3 kategori krisis yang berdasarkan waktu dari krisis tersebut, yaitu ;

1. *immediate crises.*

Krisis ini menjadi krisis yang paling ditakuti orang. Hal ini krisis semacam ini terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak terduga. Tidak ada waktu untuk penelitian dan perencanaan. Jenis krisis ini menuntut para pembuat keputusan untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu untuk merumuskan rencana induk untuk menangani krisis darurat, sehingga tidak terjadi kebingungan, konflik dan keterlambatan penanganan krisis baru.

2. *emerging crises.*

Jenis krisis ini masih memungkinkan praktisi untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu, tetapi jika tidak ditangani dalam waktu yang lama, krisis dapat pecah. Ketika krisis tersebut terjadi, akan timbul tantangan besar adalah bagi pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan korektif.

3. *sustained crises.*

Meskipun manajemen perusahaan atau organisasi telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi krisis semacam ini, namun krisis semacam ini masih berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

1.5.2 Kepekaan terhadap Krisis

Secara umum krisis dapat ditemukan ketika sebuah kelompok, organisasi, atau sebuah daerah yang mengalami ancaman serius ancaman serius terhadap struktur dasar atau nilai-nilai dan norma-norma fundamental dari suatu sistem, yang di bawah tekanan waktu dan keadaan yang sangat tidak pasti mengharuskan pengambilan keputusan penting. Menanggapi krisis sering kali menghadapi pemerintah dan lembaga publik dengan peluang pilihan yang mendesak. Ini dapat terjadi dikarenakan terdapat banyaknya Kebutuhan dan masalah yang dipicu oleh timbulnya krisis mungkin begitu besar sehingga sumber daya yang langka yang tersedia harus diprioritaskan. Ini sangat mirip dengan politik seperti biasanya, kecuali bahwa dalam situasi krisis, kesenjangan antara permintaan dan penawaran sumber daya publik jauh lebih besar, situasinya tetap tidak jelas dan tidak stabil, dan waktu untuk berpikir, berkonsultasi, dan memperoleh penerimaan untuk keputusan sangat terbatas. Krisis

juga menghadapi pemerintah dan pemimpin dengan masalah yang tidak mereka hadapi sehari-hari, misalnya mengenai pengerahan militer, penggunaan kekuatan mematenkan, atau pembatasan kebebasan sipil.

Banyak keputusan krisis penting tidak diambil oleh pemimpin individu atau oleh kelompok informal kecil pembuat kebijakan. Mereka muncul dari berbagai alternatif pengambilan keputusan dan koordinasi (McConnell, 2003; 't Hart, Rosenthal, & Kouzmin, 1993). Faktanya, respons krisis dalam masyarakat modern paling baik dicirikan dalam bentuk jaringan. Ini tidak selalu kontraproduktif, banyak pemimpin telah belajar, karena pendelegasian wewenang pengambilan keputusan di lini depan biasanya meningkatkan ketahanan masyarakat. Hal ini kemudian dikarenakan rasa krisis yang mendalam: nilai-nilai keselamatan dan keamanan yang tertanam kuat untuk diri sendiri dan orang yang dicintai berada di bawah ancaman (Raphael, 1986, hlm. 26)

1.5.3 Relasi Elite Politik

Relasi Politik merupakan bagian dari proses sosial yang terdapat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto (2006:53) masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktural yang meliputi: kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, dan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan pemerintah daerah dan DPRD merupakan wujud dari struktur sosial tersebut, sedangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi adalah cermin dari dinamika tertentu karena adanya hubungan timbal balik diantara bentuk-bentuk struktural masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun secara kelompok.

Soekanto (2006:54) memberi batasan bahwa relasi politik merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan atau mengevaluasi sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada. dengan kata lain relasi politik dapat diartikan sebagai sebuah relasi yang didalamnya terdapat berbagai macam proses interaksi antar aktor politik yang memiliki pengaruh timbal balik didalam

berbagai macam segi kehidupan bersama, misalnya mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum dan seterusnya.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Elite Politik

Masyarakat dapat dibagi berdasarkan perbedaan serta karakteristik tertentu. Tidak hanya berlandaskan pada pembeda berdasarkan sifat fisik seperti bentuk tubuh maupun warna kulit, pembeda lainnya yakni nonfisik, contohnya intelegensi dan bakat (Haryanto, 2017: 1). Berbagai macam pembeda tadi kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu alasan mengapa dalam masyarakat, terdapat sekelompok atau individu yang memiliki keunggulan ketimbang kelompok lainnya, kelompok ini kemudian dapat dikatakan sebagai kelompok elite (Haryanto, 2017: 13). Tidak hanya lebih unggul ketimbang kelompok lainnya, elite juga dapat diartikan sebagai sekelompok individu maupun orang yang mampu untuk memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat (Hartmann, 2004).

Kajian mengenai kelompok elite ini sendiri telah banyak berkembang sehingga memunculkan berbagai macam paradigma, dari pandangan klasik, marxis, hingga paradigma yang lebih kompleks dengan melihat elite tidak sekadar dari cara pandang elite yang memerintah, namun juga elite-elite di luar pemerintahan. Kemudian jika menilik pada perkembangan masyarakat yang saat ini menuju ke arah yang semakin kompleks, yakni berubahnya masyarakat yang sebelumnya bersifat homogen menuju ke masyarakat yang lebih heterogen, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, diferensiasi pekerjaan, serta berbagai persoalan lainnya yang kini tidak hanya melibatkan aktor elite tunggal di dalamnya, maka kajian yang lebih komprehensif terkait elite politik juga perlu digunakan dalam melihat elite dari berbagai sudut yang ada.

Mencoba menjawab persoalan mengenai permasalahan yang semakin kompleks dengan melibatkan peran dari elite-elite yang kini tidak lagi bersifat tunggal, maka penulis akan menggunakan teori elite politik yang dikemukakan oleh Suzanne Keller (1987) sebagai persoalan analisis dalam membedah persoalan elite yang akan penulis

teliti. Pengertian elite menurut Suzanne Keller (1987) berasal dari bahasa latin yakni “*Elligere*” yang memiliki arti “memilih”. Kata *elligere* atau memilih ini dalam konteks kajian mengenai elite ini dapat ditinjau lebih dalam dalam artian “pilihan” dari orang-orang atau sekelompok pihak yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak hanya dilihat dari posisi yang dimiliki, elite di sini biasanya terdiri atas kelompok dengan jumlah minoritas, namun memiliki pengaruh besar di masyarakat (Keller, 1987). Dalam hal ini sekelompok elite ini tidak hanya berasal dari aktor pemerintah yang memiliki kekuasaan sekaligus kewenangan yang absah, melainkan juga dapat dilihat dari kelompok-kelompok di luarnya.

Kajian terkait elite menurut Suzanne Keller (1987) didasari atas perkembangan masyarakat industrial di Amerika Serikat sejak abad ke 19. Dalam pengamatannya, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara bentuk tatanan elite dalam masyarakat tradisional dengan masyarakat industrial. Pada masyarakat tradisional yang cenderung bersifat homogen, elite yang menguasai sektor politik, sosial, serta ekonomi biasanya dimiliki oleh aktor tunggal saja. Sementara itu pada masyarakat pasca industrial, dikarenakan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan ekonomi secara pesat secara lebih luas, maka terjadi kemungkinan lebih besar untuk terjadi mobilitas sosial serta perkembangan diferensiasi sosial di masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya elite-elite lainnya di masing-masing struktur hirarkis yang hadir di masa ini. Pada perkembangan pasca industrial ini, kendati elite tidak lagi bersifat tunggal, elite masih dilekatkan dengan jumlah mereka yang minoritas, dengan beberapa karakteristik yakni ;

1. menduduki posisi utama dan penting, dimana tidak semua pihak dapat menempati posisi tersebut,
2. memiliki keunggulan serta kelebihan-kelebihan tertentu yang melekat padanya,
3. adanya tanggung jawab sosial yang lebih besar ketimbang kelompok lainnya,
4. adanya imbalan lebih terkait porsi tertentu atas posisi yang dimilikinya

Penjelasan lebih lanjut mengenai elite ini dapat dilihat dari tulisan Suzanne Keller (1987) yang menjelaskan bahwa dalam elite, terdapat perbedaan antara elite penguasa dan elite strategis. Penjelasan mengenai keduanya tidak terlepas dari perkembangan kelas yang telah berlangsung sejak abad ke-19.



Gambar 1.3 Struktur masyarakat sebelum terjadinya industrialisasi dan sesudah terjadinya industrialisasi

Elite Penguasa

Elite penguasa merupakan kelompok-kelompok yang memiliki monopoli atas posisi elite yang penting di masyarakat (Keller, 1987: 80). Posisi penting di sini menyangkut posisi-posisi formal, seperti yang ditulis oleh Dahrendorf (1959: 197-303) dengan memberikan rujukan tentang tiga kelompok yang dapat dikatakan sebagai elite penguasa, yakni (1) kepala perhimpunan khusus dalam kelas-kelas perhimpunan tertentu, (2) birokrat yang memiliki peran sebagai perumus kebijakan maupun pelaksana kebijakan, serta (3) elite pemerintah.

Elite Strategis

Masyarakat pada perkembangannya yang semakin menuju ke arah kompleks dengan kecenderungan *gesellschaft* atau solidaritas organik, hal ini kemudian menghadirkan kelompok elite dengan nama “elite strategis”. Elite strategis atau elite strategis ini merupakan perkembangan lanjutan dari bentuk elite penguasa yang sebelumnya telah dituliskan. Di sini elite strategis disebutkan sebagai perseorangan yang dipilih atas dasar motivasi serta kemampuan individual (Keller, 1987: 80). Dasar motivasi dan kemampuan ini disebutkan dapat disebarkan ke seluruh struktur sosial, sehingga tidak hanya berkuat pada kelompok elite berdasarkan kelas secara khusus (Keller, 1987: 80). Dengan demikian maka elite strategis ini biasanya identik dengan kerja keras. Sifat kerja keras yang ada didalam elite strategis tersebut diperlukan sebagai pondasi mereka. Jikalau mereka tidak bekerja keras, maka posisinya sebagai elite strategis akan diganti dengan orang yang lebih kompeten. Dengan begitu

banyaknya elite strategis yang muncul di masyarakat, maka pembahasan berikutnya tertuju kepada bagaimana elite strategis ini dapat berkembang dengan begitu cepat. Suzanne Keller menjelaskan bahwasanya perkembangan elite ini berjalan sesuai dengan proses - proses sosial yang terjadi di daerah tersebut. 4 proses sosial tersebut adalah ;

1. Pertumbuhan Penduduk
2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan
3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi
4. Perkembangan keragaman moral

1.6.2 Relasi Diantara Elite Internal Pemerintahan

Pada prinsipnya, elite politik merupakan individu yang selalu terlibat dalam setiap proses politik yang terjadi. Baik itu sebagai perumus kebijakan ataupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dalam proses politik. Di dalam pembahasan terkait proses politik, elite politik yang berperan sebagai perumus kebijakan mempunyai peran strategis yang diuntungkan oleh faktor-faktor kelembagaan yang nantinya menentukan pengambilan keputusan yang akan dijalankan oleh komunitas ataupun lingkungan yang lebih luas. Aktor politik birokrasi mempunyai keterkaitan dengan segala bentuk proses politik seperti pembuatan kebijakan, ataupun pengimplementasian kebijakan. Pada dasarnya, aktor tersebutlah yang bertanggung jawab terkait segala tahapan yang terjadi dalam kebijakan tersebut. Didalam tahapan terkait pembahasan kebijakan publik di tataran pemerintah, terdapat berbagai macam elite politik yang ikut dalam proses politik. Sehingga didalam birokrasi terdapat berbagai macam relasi antar elite politik yang dominan bersifat konflikatif. Maka dari itu, Stone (1995) menegaskan bahwasanya terdapat 4 relasi dalam konteks penggunaan kekuasaan antar institusi yaitu ;

1. Decisional

Relasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam tipe decisional terjadi karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh kedua institusi tersebut secara langsung.

2. Anticipated Reaction

Relasi ini bersifat langsung karena terjadi situasi tertentu yang mengharuskan terjadinya interaksi antar aktor politik terkait struktur kekuasaan dan manajemen sumber daya.

3. Nondecision Making

Relasi ini teridentifikasi oleh adanya elite politik yang mempunyai pengaruh tinggi di pemerintahan yang berhasil mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ketiga atau eksternal untuk mendukung salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit.

4. Systemic

Relasi ini bersifat tidak langsung karena setiap perilaku politik dipengaruhi oleh sistem yang berada di masyarakat tersebut seperti sistem sosial, sistem ekonomi ataupun sistem politik. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menempatkan pejabat publik pada posisi tengah.

Relasi yang terjadi diantara para aktor politik menurut Soekanto (2006) memiliki 2 bentuk, yaitu ;

1. Asosiatif

Bentuk relasi paling utama dalam sebuah interaksi adalah kerjasama antar individu ataupun kelompok yang masing-masing melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan bersama. Proses timbulnya kerjasama didasari pada orientasi masing-masing aktor politik yang dilaksanakan dalam berbagai macam jenis aktivitas yang mempunyai dampak diantara mereka. Bentuk relasi asosiatif ini dapat terjadi ketika terdapat interaksi antar aktor politik yang mempunyai sifat kerjasama, akomodasi, dan asimilasi

2. Disosiatif

Bentuk disosiatif merupakan proses interaksi yang terjadi ketika terdapat aktor politik yang mementingkan tujuan utamanya dibandingkan dengan tujuan utama aktor politik lainnya. Proses timbulnya interaksi ini didasari pada aktor politik yang bersaing dalam memperoleh keuntungan terbanyak melalui proses politik yang terjadi di masyarakat. Bentuk relasi asosiatif ini

dapat terjadi ketika terdapat interaksi antar aktor politik yang mempunyai sifat persaingan, kontravensi, dan pertentangan.

Berkaitan dengan kewenangan ataupun kekuasaan sumber daya dalam interaksi pemerintahan, Cockburn yang dikutip Stoker (1991:91) menjelaskan bahwa terdapat 6 arena terjadinya interaksi kekuasaan dalam politik internal institusi pemerintah daerah yaitu : *The joint elite or senior officer and councilors, The ruling party group and party causes, Councilors as ward representative, Inter-departmental conflicts, Intra-departmental relations and Inter-party deal.*

Kekuasaan yang terbangun dalam proses interaksi institusi pemerintahan daerah terbagi antara the joint elite or senior officers and councilors (dalam konteks Indonesia adalah para pejabat senior seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas atau Kepala Kantor) dan councilors (dalam konteks Indonesia adalah DPRD). Lebih lanjut Stoker (1991:91) menjelaskan untuk memahami politik internal yang melibatkan interaksi pemerintah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah perlu memahami elemen dinamis yang melingkupi proses interaksi yaitu :

1. Persepsi, menyangkut orientasi peran dari para pejabat senior pemerintah daerah dan anggota DPRD serta asumsi yang dibangun dalam masalah publik.
2. Sumber daya yang dimiliki, seperti posisi dalam hirarki kekuasaan, dan penguasaan informasi
3. Cara kerja yang meliputi strategi atau taktik yang digunakan.

1.6.2.1 Tipe Relasi Dalam Kerangka Asosiatif

Tipe relasi yang berlangsung dalam kerangka asosiatif ini menurut Levine dan White (Parson, 2005:484) dapat dikategorikan pada pendekatan *organizational exchange*. Diklasifikasikan sebagai metode pertukaran jaringan. Dalam pendekatan ini, relasi didasarkan pada tujuan bersama dan kekuatan serta sumber daya masing-masing kelompok, sehingga melalui relasi yang terjalin diharapkan penggunaan kekuatan dan sumber daya bersama berkontribusi pada pencapaian tujuan dan memberikan manfaat bagi setiap kelompok yang terlibat. Terjadinya kerjasama atau kesepakatan bersama yang berlangsung dalam suatu relasi merupakan karakteristik utama dalam proses

asosiatif. Dalam kerangka asosiatif ini berlangsung tipe-tipe relasi yaitu decisional, anticipated reaction, non decision making dan systemic.

1. Decisional

interaksi kekuasaan ini dapat dilakukan misalnya melalui tawar menawar yang didalamnya mencerminkan pertukaran kepentingan antara pemerintah daerah DPRD yang akan dirumuskan dalam prioritas pilihan kebijakan anggaran. Interaksi ini dapat dicontohkan pada saat pemerintah daerah terpaksa mengakomodasi kepentingan DPRD untuk menghindari atau mengurangi tekanan DPRD pada saat proses penyusunan/formulasi, misalnya dengan melakukan penundaan jadwal sidang sehingga memberi tambahan waktu bagi DPRD.

2. Anticipated reaction

Dalam kerangka proses asosiatif, interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk kooptasi, di mana pemerintah daerah menerima kewenangan DPRD untuk menjaga kestabilan pemerintahan daerah. Perbedaannya dengan tipe interaksi decisional adalah, DPRD tidak secara langsung menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi pemerintah daerah, tetapi dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah daerah dengan tetap mengingat wewenang dan kekuasaan dari DPRD atau sebaliknya.

3. Nondecision Making

Dalam kerangka proses asosiatif, interaksi ini dapat berlangsung melalui sifat kooptasi, di mana permintaan dari pihak ketiga diterima untuk stabilitas. Bagi pemerintah daerah, efeknya dapat diwujudkan dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan bagi DPRD dapat meningkatkan dukungan atau legitimasi politiknya.

4. Systemic

Pada proses asosiatif tipe systemic dapat terlihat ketika kelompok kepentingan menggunakan kekuasaan pemerintah daerah atau DPRD untuk menetapkan kepentingannya sebagai prioritas kebijakan, namun kondisi ini

dapat berlaku sebaliknya, yaitu kekuatan dari satu kelompok kepentingan seringkali dijadikan sumber daya oleh pemerintahan daerah maupun DPRD untuk menjadikannya kebijakan tertentu. Perbedaan antara tipe ini dengan non decisional making tertelak pada kondisi yang melingkupinya. Dalam tipe ini, pemerintah daerah dan DPRD, dalam kondisi dan masalah tertentu, harus mendapatkan dukungan dari kelompok kepentingan tertentu yang dianggap strategis untuk meningkatkan teknis kebijakan yang disepakati. Sedangkan pada tipe non-decision-making, kelompok kepentingan bersifat pasif dan umum. Ketika isu dan kepentingan DPRD juga didukung oleh kelompok kepentingan lain yang lebih kuat, maka isu dan kepentingan pemerintah daerah yang didukung oleh kelompok kepentingan tidak dapat diprioritaskan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, interaksi sistemik yang terjadi selama proses asosiatif terjadi dalam kerjasama, seringkali melalui seleksi atau akomodasi.

1.6.2.2 Tipe Relasi Dalam Kerangka Disosiatif

Dalam hal ini, interaksi terjadi karena adanya organisasi yang memiliki kekuatan dan sumber daya lebih dari pihak lain untuk mendominasi dan mempengaruhi lebih banyak, sebaliknya organisasi dengan kekuatan dan sumber daya yang lebih lemah menciptakan ketergantungan. Dalam kerangka disosiatif ini berlangsung tipe-tipe relasi yaitu decisional, anticipated reaction, non decision making dan systemic.

1. Decisional

Berbagai isu dan kepentingan yang diusung oleh Kementerian Pemerintah Daerah dan Pembangunan Demokratis seringkali menjadi dasar bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah ini untuk menggunakan wewenangnya masing-masing untuk saling mendominasi. Upaya tersebut juga dapat menjadi kontradiktif, seperti dengan menolak prioritas kebijakan yang diusulkan atau menunda kegiatan penetapan anggaran yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bernegosiasi, tetapi jika upaya ini gagal, pelaksanaannya akan mengarah pada konflik.

2. Anticipated Reaction

Ketika dalam suatu keadaan yang tidak terduga, maka akan ada upaya untuk membuat keadaan menjadi lebih stabil. Dalam mencapai hal tersebut, kemudian akan terdapat Upaya-upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan DPRD dapat bergerak ke arah kontravensi dengan tujuan mengurangi tekanan struktural kekuasaan DPRD yang dalam perjalanannya dinilai dapat menghambat usulan prioritas kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah daerah. Bentuk kontravensi ini, misalnya dapat dilakukan secara intensif melalui aktivitas penggalangan isu publik untuk menekan DPRD, demikian pula sebaliknya. Jika kontravensi ini disertai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masing-masing institusi maka akan mengarah terjadinya konflik.

3. Non Decision Making

Proses disosiatif yang melingkupi interaksi tipe non-decision-making, dapat dilihat melalui bentuk kompetisi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mendapatkan dukungan timbal balik dari kelompok kepentingan yang berbeda dalam menetapkan prioritas dalam menetapkan kebijakan anggaran. Dengan dukungan kelompok kepentingan yang lebih kuat, pemerintah daerah akan dapat mendikte pilihan kebijakan dalam anggaran DPRD, dan sebaliknya. Namun persaingan ini dapat menimbulkan kontradiksi ketika pemerintah daerah atau DPRD melakukan kegiatan untuk menolak atau menggalang dukungan, melalui penyebaran isu yang menyudutkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok bisnis untuk mendukung prioritas kebijakan tertentu atau sebaliknya dilakukan oleh pemerintah daerah yang menyudutkan kerjasama DPRD dengan kelompok bisnis.

4. Systemic

Kelompok kepentingan dengan kekuatan dan sumber daya yang lebih besar ini akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pemerintah daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan publik. Kondisi demikian berdampak pada pengabaian kepentingan kelompok lain yang memiliki

kekuatan dan sumber daya yang lebih kecil. Dari sudut kepentingan kelompok, kondisi ini menjadi sarana untuk memprioritaskan kepentingan mereka melalui kekuasaan pemerintah daerah dan DPRD. Namun, dari sudut pandang pemerintah dan DPRD, keberadaan kelompok kepentingan ini dipandang sebagai sarana strategis untuk memperkuat pemerintah daerah dan DPRD untuk memprioritaskan pilihan kebijakannya di atas kepentingan kelompok lain. Dalam beberapa kasus, peningkatan dukungan yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah daerah menimbulkan persaingan di antara keduanya, yang dapat menimbulkan kontravensi, seperti melalui bentuk-bentuk upaya taktis untuk mencegah pemerintah daerah atau DPRD menerima dukungan dari kegiatan kelompok strategis tersebut. Kemampuan pemerintah daerah atau DPRD untuk mendapatkan dukungan melalui pelanggaran tersebut pada akhirnya dapat memperkuat atau melemahkan prioritas kebijakan yang didorong oleh masing-masing instansi. Inkonsistensi ini juga dapat menimbulkan konflik.

1.6.2.3 Badan Kolektif

Kesadaran kolektif sendiri merujuk kepada orientasi dari aturan-aturan moral yang merangkul dan berasal dari nilai-nilai yang menjadi tolak ukur dari aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Didalam analisa sosiologis, kesadaran kolektif mempunyai peran pembeda dalam proses sosial yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan moral ini mempunyai banyak fungsi didalam berbagai macam kelompok, dan inividu yang membentuk masyarakat. Hal ini dikarenakan kesadaran kolektif memiliki sifat kepercayaan dan perasaam umum yang bagi rata-rata warga suatu masyarakat membentuk suatu sistem yang menentukan kehidupan. Maka dari itu, kesadaran kolektif juga dapat dikatakan sebagai bentuk kejiwaan masyarakat. (Durkheim, 1971 : 90-80).

Didalam kondisi kehidupan masyarakat yang berdiferensiasi sering ditemukan bahwasanya kesadaran kolektif kian lama kian kurang mengandung perasaan-perasaan yang ditentukan dengan kuat. Maka terjadilah bahwa intensitas rata-rata serta taraf rata-rata penentuan keadaan-keadaan kolektif selalu berkurang

(Durkheim, 1971 : 167) di dalam masyarakat yang berdiferensiasi, kesadaran kolektif tidak lagi terikat secara langsung dengan individu. Individu tersebut telah terikat dengan kesadaran kolektif tempat dimana ia bekerja atau lingkungan tempat menjabat. Dengan begitu, kesadaran kolektifnya hanya berasal dari tempat kerja atau lingkungan ia menjabat. Bukan lagi sebagai kesadaran kolektif yang memiliki nilai sebagaimana yang telah ditentukan oleh jumlah keseluruhan kehidupan sosial. Hal ini kemudian menyimpulkan kesimpulan bahwasanya di masyarakat yang berdiferensiasi, masing - masing individu atau kelompok memiliki sudut pandang yang berbeda-beda karena masing-masing individu atau masyarakat tersebut menyumbangkan suatu hasil yang bernilai sosial.

Badan atau kelompok yang mengatasnamakan kolektifitas, harus memenuhi tiga fungsi utama, yaitu yang pertama (1) Menata hubungan antar kelompok sehingga sasaran-sasaran kolektif dapat dicapai. Yang kedua (2) Menyatukan norma-norma ideal yang menyangkut dengan ketergantungan hidup dan yang terakhir (3) melambangkan solidaritas berbagai individu atau kelompok melalui berbagai macam jenis komunikasi. Maka dari itu, didalam tatanan organisasi formal yang mengatasnamakan kesadaran kolektif, elite strategis tidak dapat memaksakan kehendak pribadinya. elite strategis memiliki peran dalam beraktifitas sesuai dengan koordinasi dan struktur secara sistematis. Hal ini kemudian akan membawa elite tersebut beraktifitas dengan membawa prinsip bahwasanya aktifitasnya tidak saling tumpah tindih, melainkan memiliki sifat saling membantu.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi dampak pergantian Bupati Sidoarjo bagi kinerja Pemerintah Sidoarjo. Serta Bagaimana implementasi kebijakan dalam rangka pandemi Covid-19. dalam penerapan kebijakan, tentu akan ditemukan sebuah dinamika yang terjadi di masyarakat yang mematuhi kebijakan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya analisis dalam menyikapi kebijakan ini.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kalimat tanya “bagaimana” sebagai pondasi penelitian, dengan demikian, peneliti ingin mengetahui secara detail hubungan antar variabel-variabel yang terkait. (Gulo, 2008). dengan begitu, penelitian ini akan memiliki gambaran terkait berbagai macam dinamika yang terjadi pada saat Proses penanganan Covid-19 di Sidoarjo.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian kali ini akan menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti. Penelitian yang bersifat kualitatif melakukan penelitiannya secara mendalam dengan responden. Segala sesuatu yang mempunyai sangkut paut antara responden dan sesuatu yang kita teliti menuntun kita kepada sebuah penelitian kualitatif yang lebih akurat. Berikut adalah subyek yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian kali ini :

1. Aditya Nindyatman, Anggota DPRD Sidoarjo
2. Dr. Athoilah, Ketua Gugus Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
3. K.H. Zainal Abidin, Ketua PCNU Sidoarjo
4. Zulfatun nikmah, Staff Pemerintah Kecamatan Sukodono
5. Awalludin, Ketua Kampung tangguh Desa Kebon Agung

Dalam perjalanan penelitian ini, peneliti telah mengirimkan surat kepada pihak Pemerintah kecamatan Sukodono untuk mewawancarai Camat Sukodono, Namun Camat Sukodono berhalangan hadir karena sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Wawancara

Teknik In-depth interview atau wawancara dipilih dalam penelitian kali ini. Dengan mengajukan pertanyaan tanpa adanya alternatif pilihan jawab, akan mendapatkan informasi secara mendalam dari seorang informan (Afrizal 2014 : 136). Kedekatan peneliti dan informan juga menjadi variabel yang menentukan. Peneliti

harus tau waktu kapan wawancara harus dilakukan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, dan tidak memberatkan pihak informan dengan menyodorkan berbagai macam pertanyaan. Ketika memasuki sesi wawancara, peneliti akan menggunakan metode Wawancara tak terstandarisasi. Dimana Peneliti dan narasumber akan melakukan diskusi kecil terkait topik penelitian yang bersifat informal, fokus, dan bebas. jika diperbolehkan, peneliti juga akan melakukan rekaman saat melakukan wawancara, agar informasi yang diberikan informan benar-benar akurat dan sesuai dengan hasil wawancara.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, akan melakukan proses dalam penyusunan secara sistematis data-data yang sudah didapatkan dari teknik pengumpulan data. Data yang sudah diambil dari hasil wawancara dari subyek penelitian akan dikategorikan sebagai unit analisis organisasi. Dimana subyek penelitian akan mewakili organisasi masing - masing. Kemudian data tersebut diklasifikasi kedalam kategori data primer dan data sekunder. Pengklasifikasian ini akan membuat kesimpulan menjadi lebih mudah dipahami.

Setelah melalui pengklasifikasian data, Peneliti akan mengubahnya menjadi narasi-narasi dengan mentranskrip kemudian akan dikumpulkan atau dikategorikan sesuai dengan materi analisis yang berpedoman pada Kerangka Konseptual dan Kerangka teoritik untuk memberikan gambaran yang jelas dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, dari hasil data yang telah di analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menjelaskan terkait Relasi Elite Politik Sidoarjo dalam menangani Pandemi Covid-19.